

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI UPAH MINIMUM

Alexandra Rineldis K. Bediona

Sandrabediona19@gmail.com

Anang Subarjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to determine the effect of Local Own Sources and balancing funds on the Against Human Development Index through Minimum Wage. The research method was quantitative. Meanwhile, the research population used its Local sources, balance funds, minimum wage, and Human Development Index listed on BPD NTT in the 2017-2020 periods. Furthermore, the sample collection saturated sampling or used district/city in the province of NTT with 21 districts and one city. Moreover, the research analysis technique used the hypothesis of multiple linear. The research result concluded that first, local own sources had a negative effect on the minimum wage. Secondly, balanced funds had a positive effect on the minimum wage. The third was that local own sources indicated a negative effect on the Human Development Index. Fourth, the balance fund positively affected the Human Development Index. Fifth, minimum wage had a positive effect on the Human Development Index. Sixth, minimum wage had a positive effect on the Human Development Index. Moreover, the seventh minimum wage mediated the balanced fund on the Human Development Index.

Keywords: regional original income, balance fund, minimum wage, and human development index

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Upah Minimum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah data dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia yang terdaftar di BPS NTT periode 2017-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh atau dengan menggunakan seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT dengan jumlah 21 Kabupaten dan 1 Kota. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap upah minimum. Kedua Dana Perimbangan berpengaruh Positif terhadap Upah Minimum. Ketiga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Keempat Dana Perimbangan berpengaruh Positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kelima Upah Minimum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kenam Upah Minimum tidak dapat Memediasi Pendapatan Asli Darah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Ketuju Upah Minimum Memediasi Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, upah minimum, indeks pembangunan manusia

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah merupakan revisi dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem NKRI dapat ditingkatkan melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui APBD yang menyelenggarakan pembangunan pemerintah daerah yang berdasarkan asas desentralisasi, dan pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah daerah digunakan untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Pembelanjaan yang diperlukan lokasinya melalui masing-masing jenis belanja diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Pemerintah mengalokasikan dana untuk peningkatan pelayanan tersebut dalam bentuk alokasi dana modal untuk peningkatan pelayanan dalam bentuk alokasi belanja modal yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya (Adiputra dan Dwiyantri, 2015).

Cara untuk mengukur kualitas hidup manusia salah satunya adalah dengan cara melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah indeks komposit untuk mengatur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk hidup secara berkualitas, baik dilihat dari aspek kesehatan, Pendidikan maupun ekonomi (dalam Adiputra, Dwiyantri, 2015).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibuat dan dipopulerkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) sejak tahun 1996 dalam seri laporan tahun yang diberi judul "Human Development Report". Indeks ini disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara selain pendapatan nasional per kapita, UNDP mendefinisikan IPM sebagai "*a process of enlarging people's choice*" atau suatu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. IPM mempunyai tiga indikator terpenting yang menjadi penyusun. Pertama, usia panjang yang diukur dengan rata-rata lama hidup penduduk atau angka harapan hidup disuatu negara. Kedua, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang bisa membaca dan rata-rata tahun sekolah. Ketiga, penghasilan yang diukur dengan pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan daya belinya untuk tiap-tiap Negara (Putra dan Ulupui, 2005). Dalam setiap tahun tingkat Indeks Pembangunan Manusia mengalami tingkat yang berbeda-beda. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia disebabkan beberapa faktor yaitu Pendidikan, Kesehatan dan kualitas hidup.

Menurut Wijayab (dalam Williantara dan Budiasih, 2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang saling berkontribusi demi menunjang kemampuan daerah dalam rangka desentralisasi. Hal ini mengindikasikan tiap-tiap daerah harus menggali potensi daerahnya masing-masing, karena ukuran keberhasilan dari desentralisasi adalah seberapa besar ketergantungan daerah pada pemerintahan pusat. Pemerintah daerah bebas menggunakan PAD dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah daerah bebas menggunakan PAD dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahan pembangunan daerah. Pertumbuhan PAD seharusnya sensitive terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Upah Minimum pada daerah tersebut.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dilokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan untuk mengurangi fiskal antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Penggunaan DAU diharapkan untuk keperluan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Wiliantara dan Budiasih, 2016).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat dengan DAK adalah dana yang sumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat dengan DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. DBH dialokasikan untuk membiayai keperluan daerah dalam melaksanakan keperluan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dijelaskan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi pekerjaan/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui upah minimum di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

TINJAUAN TEORITI

Teori Keagenan

Teori ini menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan atau kaitan antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* adalah pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal* (Scott, 2015).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pasal 22, struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan daerah melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Penyerah sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan restribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintah kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pasal 21 menyatakan bahwa pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 3

menyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menandai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai pewujudan desentralisasi.

Dana Perimbangan

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan pasal 1 menyatakan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dalam Pasal 2 menyebutkan dana perimbangan terdiri atas : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi hasil (DBH).

Indeks pembangunan Manusia (IPM)

Pengertian indeks pembangunan manusia diklasifikasikan oleh Lembaga UNDP (*United Nation Development Program*) sebagai "suatu proses untuk memperluas berbagai macam pilihan bagi penduduk ". Dengan demikian, IPM merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia. United Nations Development Program (UNDP) telah menerbitkan laporan pembangunan sumber daya insani dalam suatu kuantitatif yang disebut dengan *Human Development Indeks (HDI)*.

Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah adalah gaji adalah pembayaran yang dibedakan. Gaji dapat diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, dan manejer. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang selalu berpindah-pindah atau tidak tetap seperti pekerjaan pertanian, buru pelabuhan.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Upah Minimum

Menurut Puspita, (2009) pendapatan asli daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hal ini mengindikasikan tiap-tiap daerah harus mengali potensi daerahnya masing-masing karena dengan demikian PAD akan tinggi dan akan berdampak pada upah minimum yang semakin tinggi (Azahari *et al.*, 2021) .

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Mirsan *et al.*, (2019) serta Tahar dan Zakhiya (2011) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif terhadap upah minimum regional. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pendapatan asli daerah dapat meningkatkan upah minimum maka penulis mengajukan hipotesis bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap upah minimum.

H₁: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap upah minimum.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Upah Minimum

Dana perimbangan merupakan dana yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU adalah salah satu elemen dari dana perimbangan yang dimana dalam pengalokasi mendahulukan pemerataan dan keadilan yang sejajar dengan program yang dilakukan oleh pemerintah (Williantara *et al.*, 2016). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan pembangunan daerah yang terkait dan akan berdampak pada pembangunan nasional (Williantara dan Budiasihh, 2016). Dan yang terakhir adalah Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang digunakan untuk membiayai jalannya pelaksanaan otonomi daerah

dengan menginginkan tujuan dalam mengurangi ketimpangan fiskal variabel antar tingkat pemerataan melalui cara pemeratakan keunggulan fiskal antara pemerintah daerah mendorong belanja daerah untuk membiayai program- program yang mengalami dampak pada pembangunan nasional, pencapaian infrastruktur publik, dan mendorong pendapatan daerah (Williantaraa dan Budiasih, 2016). Dengan demikian maka dana perimbangan memiliki dampak pada upah minimum yang dimana upah minimum dilihat dari kesejahteraan masyarakat (Afif dan Yulianti, 2019)

Berdasarkan hasil penelitian oleh Afif dan Yulianti (2019), Ladjin (2018) yang menguji pengaruh dana perimbangan terhadap upah minimum regional dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap upah minimum regional. Pernyataan ini membuktikan bahwa dengan adanya dana perimbangan dapat meningkatkan upah minimum regional maka penulis mengajukan hipotesis bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap upah minimum regional.

H₂: dana perimbangan berpengaruh positif terhadap upah minimum.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Desentralisasi merupakan satu rangka yang dimana penunjang kontribusi terbesarnya adalah pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu membuat tiap-tiap daerah untuk menggali potensi daerahnya masing-masing, karena ukuran kesuksesan suatu daerah dari desentralisasi adalah seberapa kuat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. PAD adalah dana yang dimana pemerintah daerah bebas menggunakan dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Wiliantara dan budiasi, 2016). Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia pada daerah tersebut (Bappenas dalam Wiliantara dan Budiasih, 2016).

Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Ulupui (2015), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara stabil dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pradnyantari dan Dwirandra (2017) Memberikan penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu dapat disimpulkan dari penelitian terdahulu bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Sebab itu, hipotesis penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H₃: Pendapatan hasil daerah berpengaruh positif dan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Terlansir dalam UUD Nomor 32 Tahun 2004 tentang kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan daerahnya yang berbeda-beda yang membuat adanya penyebab ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Otonomi daerah yang merupakan kegiatan daerah yang dinilai oleh pemerintah yang pengelokasian dana yang bersumber dari APBN adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal. Dana perimbangan meliputi DAU, DAK dan DBH, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu elemen dari dana perimbangan yang dimana dalam pengalokasi mengedahulukan pemerataan dan keadilan yang sejajar dengan program yang dilakukan oleh pemerintah (Williantara dan Budiasih, 2016). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan pembangunan daerah yang terkait dan akan berdampak pada pembangunan nasional (Williantara dan Budiasih, 2016). Dan yang terakhir adalah Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang digunakan untuk membiayai jalannya pelaksanaan otonomi daerah dengan menginginkan tujuan dalam mengurangi ketimpangan fiskal variabel antar tingkat pemerataan melalui cara pemeratakan keunggulan fiskal antara

pemerintah daerah mendorong belanja daerah untuk membiayai program-program yang yang mengalami dampak pada pembangunan nasional, pencapaian infrastruktur publik, dan mendorong pendapatan daerah (Williantaraa dan Budiasih, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Harahap Riva Ubar (2017) menunjukkan bahwa secara serentak menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indesk Pembangunan Manusia (IPM), penelitian dilakukan oleh Putra dan Ulupui (2015) bawah DAK sanggup meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, dan penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2017) bahwa secara serentak Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H₄: Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap Indesk Pembangunan Manusia.

Upah Minimum Regional Mempengaruhi Indek Pembangunan Manusia

Upah minimum menjadi salah satu indikator untuk mengatasi tingkat pengangguran. Upah minimum yang rendah berarti penduduk disuatu wilayah tersebut memiliki standar hidup dan tingkat konsumsi yang rendah pulah, sedangkan kota atau kabupaten yang memiliki upah minimum yang tinggi berarti penduduk dikota atau kabupaten tersebut memiliki standar hidup dan tingkat konsumsi yang tinggi maka akan memiliki indeks pembangunan kemanusia yang tinggi (Mahihody, 2018)

Pernyataan diatas didukung oleh penelithan Afif dan Yulianti (2019); Lugastoro, (2013); Williantara dan Budiasih (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi upah minimum regional semakin tinggi indek pembangunan manusia. Hal ini disebabkan oleh upah minimum adalah perantaran yang mengukur indekspembangunan manusia maka penulis mengajukan hipotesis bahwa upah minimumregional berpengaruh positif terhadap indek pembangunan manusia.

H₅: Upah minimum berpengaruh positif terhadap Indesk Pembangunan Manusia.

Upah Minimum Memediasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indesk Pembangunan Manusia (IPM)

Suatu kontribusi yang dimana menjadi salah satu acuan dalam sebuah keputusan. Kontribusi pendapatan asli daerah dan merupakan salah satu faktor utama dalam dalam peningkatan dan penurunan indeks pembangunan manusia semakin tinggi kontribusi pendapatan daerah maka semakin tinggi upah minimum dan indek pembangunan manusia. Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadapkenaikan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia pada daerah (BAPPENAS, 2003). Upah merupakan sumber penghasilan, bila upah atau sumber penghasilan turun atau tetap maka kesejahteraan juga turun atau tetap dan itu juga pasti mempengaruhi indeks pembangunan manusia (Mahihody, 2018).

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian azhari *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, upah minimum dan indeks pembangunan manusia memiliki hubungan. Berdasarkan pernyataan tersebut hipotesis penelitian ini adalah upah minimum memediasi pendapatan asli daerah terhadap indek pembangunan manusia.

H₆ :Upah Minimum Memediasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Upah Minimum Memediasi Dana Perimbangan terhadap Indesk Pembangunan Manusia (IPM)

Dana perimbangan memiliki hubungan signifikan terhadap upah minimum yang dimana menyatakan bahwa semakin tinggi dana perimbangan maka semakin tinggi upah minimum dimana upah minimum dilihat dari kesejahteraan masyarakat (Afif dan yulianti, 2019). Upah merupakan sumber penghasilan, bila upah atau sumber pengasilan turun atau

tetap maka kesejahteraan juga turun atau tetap dan itu juga pasti mempengaruhi indeks pembangunan manusia (Mahihody, 2018). Pernyataan diatas didukung dengan penelitian penelitian Azhari *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa dana perimbangan, upah minimum dan indeks pembangunan manusia memiliki hubungan. Berdasarkan pernyataan tersebut hipotesis penelitian ini adalah upah minimum memediasi dana perimbangan daerah terhadap indeks pembangunan manusia.

H₇: Upah Minimum Memediasi Dana Perimbangan terhadap IndeksPembangunan Manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambar Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif metode yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variable penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. menurut Sugiono (2013:13), metode penelitian kuantitatif dengan diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif /statistic tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Indriantoro dan Supomo (2014;115) mengatakan bahwa populasi adalah sekelompok orang-orang, benda -benda ataupun suatu kejadian yang mempunyai karakteristik tertentu, objek dan subjek dari karakteristik inilah yang kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai adanya pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia melalui upah minimum di Provinsi NTT.

Teknik Pengumpulan Sampel

Sampel (sample) merupakan Sebagian dari populasi yang ada. Metode sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampel Jenuh Yang dimana menggunakan 21Kabupaten DAN 1 Kota yang ada di Provinsi NTT .

Pemilihan sampel untuk digunakan dan diolah dalam penelitian ini adalah Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Provinsi NTT tahun 2018-2021, data upah minimum dari Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi NTT dan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil, Upah Minimum dan kondisi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data

Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, seperti melalui orang lain maupun melalui dokumen (Pradyantari dan Dwirandra, 2017). Data sekunder yang digunakan penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi APBD, Upah Minimum dan kondisi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT, upah minimum dan indeks pembangunan manusia yang dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTT.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dan definisi operasional variable dapat diartikan sebagai salahsatu objek

atau suatu yang menjadi perhatian dalam suatu variable yang mempunyai kemampuan dan variasi yang cantumkan atau digunakan dalam suatu penelitian. Tetapi tiga macam variable yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variable dependen, variable independent dan menggunakan variable moderasi. Variabel-variabel ini akan diteliti untuk mengetahui hubungan antara ketiga variable tersebut.

Variabel Independen

Variabel independen adalah jenis variable yang dipengaruhi variable lain akan tetapi dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau menimbulkan variable independen (Gunanto, 2016). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2). Pendapatan Asli Daerah adalah dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pasal 6 mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-Lain Yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah.}$$

Dana Perimbangan yang terdiri dari Pertama Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah Pasal 1 bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kedua Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, Dan ketiga Dana Bagi Hasil (DBH) Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbang Keuangan antar pemerintah pusat dan daerah Pasal 1 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variable yang mengalami pengaruh atau akibat, yang disebabkan oleh variable independen (Sugiyono, 2010 dalam Wiliantara dan Budiasih, 2016). Dalam penelitian ini variable independen adalah indeks pembangunan manusia. Yang dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki komponen-komponen yaitu: *Pertama Angka Harapan Hidup saat Lair -Life Expectancy (e₀), kedua Rata-rata Lama Sekolah-Mean Years of Schooling (MYS), ketiga Harapan Lama Sekolah -Expected Years Of Schooling (MYS) dan keempat Pengeluaran per Kapita Disesuaikan-Purchasing Power Party (PP).*

Variabel Intervening

Variabel intervening yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum regional. Menurut (Wasilaputri, 2016) Upah minimum merupakan upah minimum yang yang ditentukan berlandaskan taraf hidup dengan memperhatikan produktivitas pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama dilakukan penetapan upah minimum adalah yang dimana untuk memenuhi standar hidup minimum seperti Kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja (Panjawa dan Soebagioyo, 2014).

Teknik Analisis Data

Teknik penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai dasar pengelolaan analisis data yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Upah Minimum. Teknik analisis data yang dimana merupakan proses pengelola suatu data menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan mudah dipahami sehingga dapat menjawab rumusan dari permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Berikut ini adalah tahap-tahap yang digunakan peneliti dalam proses pengelola data antara lain sebagai berikut:

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, serta jumlah data. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui profil dari data penelitian data penelitian melalui hubungan antara variable penelitian (Adiputra *et al.*, 2015).

Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik dalam regresi linier berganda diantaranya adalah uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji linearitas yang diuraikan sebagai berikut:

Uji Normalitas

Ujian normalitas yang memiliki tujuan menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu memiliki satu distribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnow. Jika didapatkan angka signifikan $> 0,005$ maka dikatakan norma, jika nilai signifikan $< 0,05$ maka data tersebut berdistribusi tidak normal. (Ghozali 2006)

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya suatu korelasi antar variabel independent dalam model regresi. Apabila model regresi tidak mempunyai korelasi antar variabel independent atau tidak dapat terjadi multikolinieritas maka dapat dikatakan bahwa model regresinya baik. Nilai Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dapat digunakan untuk mendeteksi apakah model regresi tersebut terjadi atau tidak. Ghozali (2016) mengatakan bahwa model regresi dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika suatu nilai tolerance lebih besar dari 0,10 ($\geq 0,10$) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 (≤ 10). Pengujian autokorelasi dapat menggunakan Uji Statistik Q: Box-Pierce dan Ijung Box. Uji Box Pierce dan Ijung Box digunakana untuk melihat autokorelasi dengan lag lebih dari dua (Ghozali, 2018:119).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak saman varian dari satu pengamatan kepengamat yang lain. Suatu model yang baik adalah yang tidak mengandung heteroskedastisitas atau disebut homokedastisitas (Ghozali,

2006).

Analisis Regresi Ganda

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi ganda untuk meneliti dan memprediksi sesuatu keadaan, naik atau turunnya suatu variabel dependen, bila dalam penelitian menggunakan dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predaktor dimanipulasi dengan minimal variabel independennya 2 (Sugiono, 2017:305). Berikut ini adalah rumusan regresi ganda untuk penelitian ini:

Tahap 1

$$UM = \alpha + b_1PAD + b_2DP + e$$

Tahap 2

$$IPM = \alpha + b_1PAD + b_2DP + b_3UM + e$$

Keterangan	:
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
α	: Nilai Konstanta
PAD	: Pendapatan Daerah
DP	: Dana Perimbangan
UM	: Upah Minimum
$b_1b_2b_3$: koefisien regresi dari variabel independen : eror

Uji Kelayakan Modal (Uji F)

Uji kelayakan modal atau yang biasa disebut juga ujian statistic F digunakan untuk mengetahui apakah variable independen secara bersama-sama atau joint mempengaruhi variable independent secara positif (Ghozali, 2016). Dengan demikian dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat signifikan 0,005. Dengan beberapa kriteria keputusan sebagai berikut; bila nilai signifikan uji $F > 0,005$ berarti model yang digunakan akan ditolak, namun apabila nilai signifikan uji $F < 0,05$ berarti model penelitian bisa dilanjutkan pada analisis selanjutnya.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam uji koefisien Determinasi (R^2) yang digunakan mengukur sejauh mana kemampuan presentasi semua variable terhadap variabel dependen. Langka yang dapat diambil dari determinasi R^2 yaitu: Nilai koefisien determinasi berganda adalah 0 dan 1 (Nol dan satu), jika suatu nilai R^2 mempunyai nilai Nol artinya kemampuan suatu variable independennya yang untuk menjelaskan variable independenya nilai 1 atau mendekati 1 itu artinya kemampuan dari suatu variable independen menggambarkan informasi yang diperlukan oleh variable dependen (Ghozali, 2016).

Ujian Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji-T-test) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing- masing variable independent terhadap variable dependen. Adapun kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat level of signifikan yaitu; jika nilai signifikan uji t lebih besar dari ($t > 0,005$) maka variable independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variable dependen, hal ini membuktikan bahwa hipotesisnya ditolak. Karena itu apabila nilai signifikan uji t lebih kecil dari 0,05 ($t < 0,05$) maka variable independen tersebut mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variable independent, ini berarti hipotesisnya diterima (Ghozali, 2016: 97)

Analisis Variabel Mediasi

Persyaratan suatu variabel dikatakan mediasi jika variabel X signifikan terhadap variabel Z , lalu variabel Z signifikan terhadap variabel Y dan variabel X tidak signifikan terhadap variabel Y maka dikatakan sebagai variabel mediasi sempurna (complete mediaton). Jika variabel X signifikan terhadap variabel x, lalu variabel Z signifikan terhadap variabel Y dan variabel X signifikan terhadap Y dimana koefisien variabel X terhadap Y maka dikatakan sebagai mediasi sebagian (partial mediation). Sebaliknya jika variabel X tidak signifikan terhadap variabel Z dan variabel Z tidak signifikan terhadap variabel Y maka dikatakan bukan Sebagai variabel mediasi (Solimun, 2011.).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis Data Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UM (Z)	88	1525000	2007500	1734937.50	159170.259
IPM (Y)	88	55.22	79.71	63.4659	4.25819
PAD(X1)	88	27305837	229137473	74407556.78	37827210.520
DP(X2)	88	42777199	1067388332	722064860.42	167842207.390
Valid N (listwise)	88				

Sumber :Data Sekunder Diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat diuraikan secara deskriptif nilai maksimum, minimum, mean, dan standar deviation dari masing-masing variabel sebagai berikut: Pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum 27305837 dan nilai maksimumnya sebesar 229137473 Besarnya nilai standar deviasi adalah 37827210.520 dan nilai rata-rata sebesar 74407556, Dana perimbangan memiliki nilai minimum 42777199 dan nilai maksimum sebesar 1067388332.Besarnya 16782207 nilai standar deviasi adalah 167842207.390dan memiliki nilai rata-rata 72.206.486.042, Upah minimum memiliki nilai minimum 1525000 dan nilai maksimum sebesar 2007500. Besarnya nilai standar deviasi adalah 159170.259 dan nilai rata-rata sebesar 1734937.5, dan Indeks Pembangunan Manusia Indeks pembangunan manusia memiliki nilai minimum 55.22 dan nilai maksimum 79.71. Besarnya nilai standar deviasi adalah 4.25819 dan nilai rata-rata sebesar 63.4659.

Ujian Asumsi Klasik
Ujian Noermalitas
Persamaan 1

Tabel 2
Hasi Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		88
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	157673.81851781
Most Extreme Differences	Absolute	.140
	Positive	.121
	Negative	-.140
Test Statistic		.140
Asymp. Sig. (2-tailed)		.202 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Sekunder Diolah (2022)

Berdasarkan uji normalitas persamaan 1 yang dilakukan dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) Sebesar 0,202>0,05. Sehingga dapat di simpulkan bahwa data terdistribusi.

Persamaan 2

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		88
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.15530537
Most Extreme Differences	Absolute	.173
	Positive	.173
	Negative	-.109
Test Statistic		.173
Asymp. Sig. (2-tailed)		.436 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber:Data Seekunder Diolah (2022)

Berdasarkan uji normalitas persamaan 2 Tabel yang dilakukan dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) Sebesar 0,0436>0,05. Sehingga dapat di simpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Tabel 4
Uji Multikolinieritas

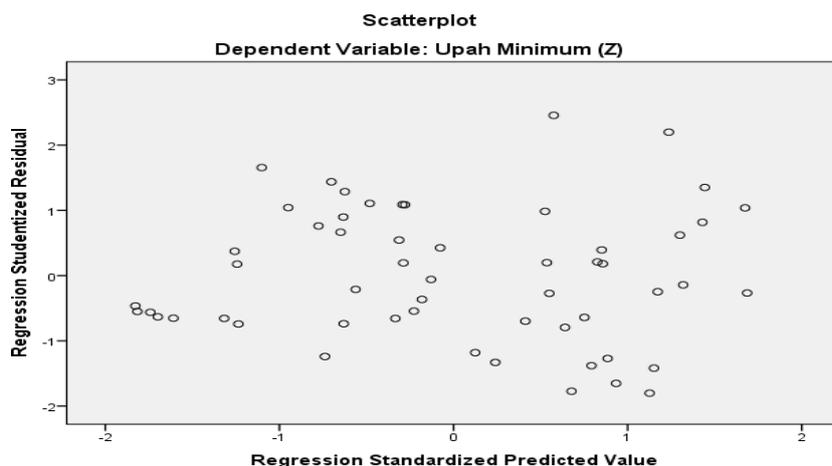
Coefficients ^a			
Collinearity Statistics			
Model		Tolerance	VIF
1	PAD (X1)	722	1.384
	DPX2)	734	1.362
	UM(Z)	981	1.019

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Sumber: Data Sekunder Diolah (2022)

Berdasarkan uji multikolinieritas pada persamaan 2, diperoleh nilai VIF sebesar 1.384 unuk variabel pendapatan asli daerah, 1.362 untuk variabel dana perimbangan dan untuk variabel upah minimum sebesar 1.019. Berdasarkan variabel tersebut diketahui tidak terjadi gejala multikolinieritas pada persaman 2 karena nilai tolerance (>) 0,10 dan nilai VIF memiliki nilai < 10.

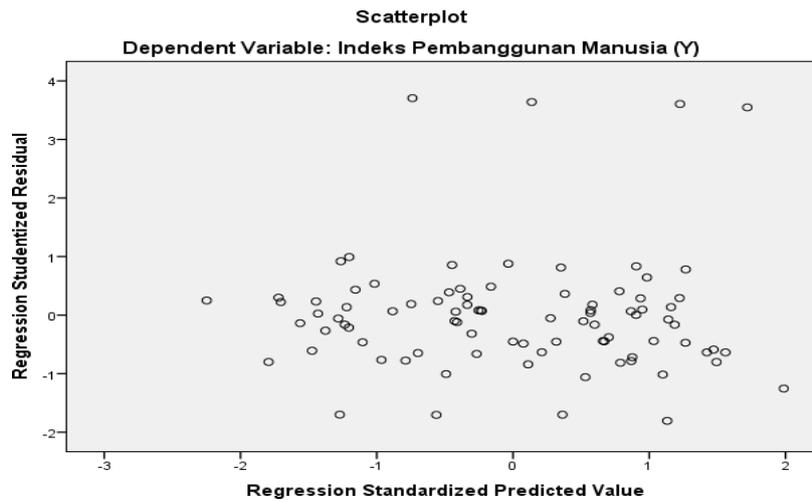
Uji Heteroskedastisitas
Persamaan 1



Gambar 1
Hasil Uji Scatterplot
Sumber : Data Sekunder Diolah (2022)

Berdasarkan Output pada gambar 2, diketahui bahwa:Titik-titik data tersebar diatas dan di bawah atau disekitar angka, titik-titik tidak mengumpul tidak diatas dan dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebarkemudian menyempit dalam dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Berdasarkan data tersebut maka disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, sehingga model yang baik dan ideal dapat dibentuk.

Persamaan 2



Gambar 2
Hasil Uji Scatterplot
Sumber Data Sekunder Diolah (2022)

Berdasarkan Output pada gambar 3, diketahui bahwa: Pertama titik-titik data tersebar diatas dan di bawah atau disekitar angka 0, kedua titik-titik tidak mengumpul tidak diatas dan dibawah saja, ketiga penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dalam dan melebar kembali, keempat penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Berdasarkan data tersebut maka disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, sehingga model yang baik dan idel dapat dibentuk.

Uji Regresi Liner Berganda
Persamaan 1

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Liner Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	1761497.188	75677.178			23.276.000
PAD(X1)	-.001	.001	-.150		-1.194.006
DP (X2)	.028	.000	.030		.237.004

Sumber: Data Sekuder Diolah (2022)

Berdasarkan hasil analisis regresi liner berganda persamaan 1 yang ditunjukkan pada Tabel 8 diatas maka persamaan regresi linear berganda yang di dapat adalah sebagai berikut:

$$UM = \alpha + b_1PAD + b_2DP + e$$

$$UM = 176.149.188 + -0,001 + 0,28 + e$$

Konstan (α) Nilai konstan sebesar 1.761.497.188 berarti apabila semua variabel pendapatan asli daerah , dan dana perimbangan tidak mengalami perubahan, maka nilai upah minimum sebesar 176.147.188 Nilai berpengaruh positif artinya terjadi peningkatan

dalam kenaikan indeks pembangunan manusia sebesar 1.761.497.188 apabila pendapatan asli daerah dan dana perimbangan meningkat, Koefisien Pendapatan Asli Daerah (X₁), Hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh tingkat koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah sebesar -0,01. Hasil ini menunjukkan arah hubungan antara variabel PAD dengan UM bersifat negatif. Keadaan ini mencerminkan semakin tinggi tingkat pengungkapan PD maka akan tidak akan berdampak pada UM, Koefisien Regresi PD (X₂) Hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh tingkat koefisien regresi variabel DP sebesar 0,028. Hasil ini menunjukkan arah hubungan antara variabel DP dengan upah minimum bersifat positif. Kondisi ini mencerminkan semakin besar dana perimbangan maka akan berdampak pada upah minimum.

Persamaan 2

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Liner Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	53.374	5.448			9.797	.000
	PAD (X ₁)	-9.158	.001	-.081		-.649	.018
	DPX ₂)	2.535	.080	.100		.804	.002
	UM (Z)	4.500	.097	.193		1.793	.008

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Sumber :Data Sekunder Diolah (2022)

Berdasarkan hasil ujian regresi linier berganda persamaan 2 yang ditunjukkan pada Tabel 9, maka persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini, yaitu diterakan sebagai berikut:

$$IPM = \alpha + b_1PAD + b_2P + b_3UM + e$$

$$IPM = 53.374 - 9.158 + 2.535 + 4.500 + e$$

Konstan (α) Nilai konstan = 53,374 berarti apabila semua variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan upah minimum tidak mengalami perubahan, maka indeks pembangunan manusia sebesar 53,374. Nilai ini berpengaruh positif artinya terjadi peningkatan dalam kenaikan indeks pembangunan manusia sebesar apabila 53,374 pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan upah minimum meningkat, Nilai koefisien b₁ Hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh tingkat koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah sebesar -9,158. Hasil ini menunjukkan arah hubungan variabel pendapatan asli daerah dengan indeks pembangunan manusia bernilai negatif. Keadaan ini mencerminkan semakin tinggi pengungkapan pendapatan asli daerah maka tidak akan berdampak indeks pembangunan manusia, Koefisien Regresi Dana Perimbangan (X₂) Hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh tingkat koefisien regresi variabel dana perimbangan sebesar 2,535. Hasil ini menunjukkan arah hubungan variabel dana perimbangan dengan indeks pembangunan manusia bernilai positif. Keadaan ini mencerminkan semakin tinggi pengungkapan dana perimbangan maka akan berdampak meningkatkan indeks pembangunan manusia dan Koefisien Regresi Upah Minimum Hasil Pengujian telah dilakukan, diperoleh tingkat koefisien regresi variabel upah minimum sebesar 4,500. Hasil ini menunjukkan arah hubungan variabel upah minimum dengan indeks pembangunan manusia bernilai positif. Keadaan ini menunjukkan semakin tinggi pengungkapan upah minimum maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Uji kelayakan model

Uji F

Persamaan 1

Tabel 7
Hasil Uji F

		ANOVA ^a			
		Sum of Squares	Df	Mean Square	F
Model					Sig.
1	Regression	412.968	2	206.496.811	.008 ^b
	Residual	235.162	85	254.423	
	Total	220.422	87		

a. Dependent Variable: Upah Minimum (Z)

b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan (X2), Pendapatan Daerah (X1)

Sumber :Data Sekunder Diolah (2022)

Berdasarkan Tabel diketahui bahwa nilai sig 0,008 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap upah minimum. Hal ini mengindikasikan bahwa model penelitian ini layak untuk dilanjutkan karena nilai $F < 0,0$.

Persamaan 2

Tabel 8
Hasil Uji F

		ANOVA ^a			
		Sum of Squares	Df	Mean Square	F
Model					Sig.
1	Regression	75.311	3	25.1041.404	.005 ^b
	Residual	1502.191	84	17.883	
	Total	1577.502	87		

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia (Y)

b. Predictors: (Constant), Upah Minimum (Z), Dana Perimbangan (X2), Pendapatan Daerah (X1)

Sumber :Data Sekunder Diolah (2022)

Pada Tabel persamaan persamaan 2 memperlihatkan tingkat signifikan Uji F didapat sebesar 0,005 dan dapat disimpulkan variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan upah minimum berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia karena nilai $F < 0,05$.

Uji R²

Persamaan 1

Tabel 9
Hasil Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.137 ^a	.419	.394	159518.019	1.732

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan (X2), Pendapatan Daerah (X1)

b. Dependent Variable: Upah Minimum (Z)

Sumber:Data Sekunder Diolah (2022)

Pada persamaan 1 Tabel 9 maka, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,419. Hal ini menunjukkan bahwa derajat korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat adalah sebesar 41,9%. Hal ini dapat diartikan bahwa antara variabel pendapatan asli daerah

dan dana perimbangan dan upah minimum memiliki hubungan yang lemah, sehingga variabel pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terbatas untuk menjelaskan variabel upah minimum dikarenakan R-square menjauh angka 1 atau 100%.

Sedangkan nilai Adjusted R Square (R^2) sebesar 0,419 atau 39,4%.menunjukkan bahwa seluruh variabel independen bisa menjelaskan variabel dependen sebesar 39,4%, sedangkan sisanya sebesar 60,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikutsertakan dalam model penelitian.

Persamaan 2

Tabel 10
Hasil Uji R^2

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.218 ^a	.477	.437	4.22886	1.820

a. Predictors: (Constant), Upah Minimum (Z), Dana Perimbangan (X2),Pendapatan Daerah (X1)

b. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Sumber :Data Sekunder Diolah (2022)

Pada persamaan 1 Tabel 10 maka, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,477. Hal ini menunjukkan bahwa derajat korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat adalah sebesar 47,7%. Hal ini dapat diartikan bahwa antara variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, upah minimum dan indeks pembangunan manusia memiliki hubungan yang lemah, sehingga variabel pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan upah minimum terbatas untuk menjelaskan variabel indeks pembangunan manusia dikarenakan R-square menjauh angka 1 atau 100%. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) diketahui sebesar 0,437 atau 43,7%. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel independen dan variabel intervening.

Uji t

Persamaan 1

Tabel 11
Coefficients
Coefficients^a

Model		Unstandardized	Standardized	t	Sig.
		Coefficients	Coefficients		
1	(Constant)	1761497.188		23.276	.000
	PAD(X1)	-.001	-.001	-1.194	.006
	DP (X2)	.028	.000	.237	.004

a. Dependent Variable: Upah Minimum (Z)

Sumber :Data Sekunder Diolah (2022)

Tabel 12
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	53.374	5.448			9.797.000
	PAD (X1)	-9.158	.001	-.081		-.649.018
	DPX2)	2.535	.080	.100		.804.002
	UM (Z)	4.500	.097	.193		1.793.008

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Sumber :Data Sekunder Diolah (2022)

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Upah Mminimum

Dalam hipotesis sebelumnya pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap upah minimum, dimana pendapatan asli daerah sangat berpengaruh terhadap upah minimum. Dengan adanya dana dari pendapatan asli daerah yang digunakan mampu meningkatkan upah minimum.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan, variabel pendapatan asli daerah dengan tingkat signifikansi $0,006 < 0,05$ dengan nilai t hitungan sebesar $-1,194$ maka hipotesis pertama (H_1) ditolak, dengan artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap upah minimum dengan arah yang negatif, bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan asli daerah maka tidak akan berdampak pada upah minimum karena penentuan upah minimum kabupaten/kota di NTT tidak ditentukan berdasarkan PAD. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata yang kecil yaitu 74.407.555,78 yang dibandingkan nilai rata-rata PAD Indonesia sebesar 156.683.410.487,75 dan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT menjadi salah satu PAD terkecil di Indonesia (BPS Indonesia 2021). PAD yang kecil bukan penentu upah minimum di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tetapi yang menentukan upah minimum di NTT ditentukan Gubernur yang mempertimbangkan negosiasi dari pengusaha dan karyawan yang ditulis dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor: 305/KEP/KH/2020. Dengan demikian Penggunaan dana dari pendapatan asli daerah yang digunakan tidak sebagai penentuan upah minimum di kota/kabupaten di NTT.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Mirsan, Hamzah dan Sjufri, 2019; Tahar & Zakhiya, 2011) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap upah minimum ke arah yang positif.

Pengaruh Pendapatan Dana Perimbangan terhadap Upah Minimum

Dalam Hipotesis sebelumnya dana perimbangan berpengaruh positif terhadap upah minimum. Dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil yang dana-dananya merupakan salah satu faktor dalam mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan, variabel dana perimbangan dengan tingkat signifikansi $0,004 < 0,05$ dengan nilai t sebesar $0,237$ dengan arah positif maka hipotesis kedua (H_2) diterima, dengan artinya dana perimbangan berpengaruh terhadap upah minimum dengan arah yang positif. Dari hasil penelitian ini berarti dana-dana dari dana perimbangan mempengaruhi terhadap upah minimum setiap kabupaten/kota di NTT dengan kata lain semakin tinggi dana perimbangan maka semakin tinggi upah minimum.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Afif dan Yulianti (2018) serta Ladjin (2018) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap upah minimum. Hal ini menunjukkan dana perimbangan searah dengan upah minimum setiap

kabupaten/kota di NT dimana semakin tinggi dana perimbangan akan semakin tinggi upah minimum dan sebaliknya.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dalam hipotesis sebelumnya pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu rangka yang dimana penunjang kontribusi terbesar dalam desentralisasi. Dana-dana dari pendapatan asli daerah mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia yang ditunjukkan dengan pembangunan daerah seperti sekolah dan rumah sakit, karena dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, kota atau kabupaten mampu membeli kebutuhan atau fasilitas penunjang kegiatan masyarakat yang kemudian pemakaiannya dilakukan secara optimal maka akan dapat meningkatkan IMP.

Berdasarkan hasil ujian hipotesis yang sudah dilakukan, variabel pendapatan daerah dengan tingkat signifikansi $0.018 < 0,05$ ada tetapi negatif yang menjadikannya hipotesis yang digunakan ditolak, maka hipotesis ketiga (H_3) ditolak, dengan artinya pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan arah yang negatif. Alasannya karena rata-rata nilai pendapatan asli daerah di kabupaten/kota di provinsi NTT relatif kecil dengan nilai 74.407.555,78 dibandingkan dengan rata-rata Dana Perimbangan sebesar 722.064.860,42 yang dimana pemerintah mengambil keputusan dengan meningkatkan indeks pembangunan manusia tidak dilihat dari PAD tetapi indeks pembangunan manusia meningkat dengan bantuan dari dana perimbangan yang disalurkan kepada masyarakat dan dimanfaatkan masyarakat dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, yang pertama pemanfaatan dana bergulir (bantuan) secara baik dan tepat sasaran, kedua rangsangan pertumbuhan ekonomi rakyat oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah melalui penyaluran dana APBN maupun APBD, keempat memberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat (kelompok tani, nelayan, pemuda, perempuan) dalam meningkatkan ekonomi melalui peluang pasar yang ada (BPS NTT 2021) dengan penentuan tersebut indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di provinsi NTT tidak tertinggal dengan kabupaten/kota di provinsi lain.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Putra dan Ulupui (2015), yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara stabil dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pradyantrori dan Dwirandra (2017) memberikan penelitian bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada indeks pembangunan manusia.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dalam Hipotesis sebelumnya diduga dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dana perimbangan yang dimana terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil yang merupakan salah satu faktor yang meningkatkan pembangunan daerah dan terjalannya otonomi daerah. Indeks pembangunan manusia meningkat jika pembangunan daerah merata dan otonomi daerah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil ujian hipotesis yang sudah dilakukan, variabel dana perimbangan dengan tingkat signifikansi $0,558 > 0,05$ nilai t sebesar 1,793 maka hipotesis empat (H_4) diterima, dengan artinya dana dari dana perimbangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan arah yang positif, semakin tinggi dana perimbangan maka akan indeks pembangunan manusia akan tinggi. artinya dana perimbangan dari tahun 2017-2020 memberikan pengaruh peningkatan terhadap indeks pembangunan manusia sebaliknya jika dana perimbangan kecil maka indeks pembangunan akan searah dengan dana perimbangan karena salah satu penentuan indeks pembangunan manusia juga dilihat dari dana perimbangan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Harahap, Riva, dan Ubar (2017) yang menunjukkan secara serentak bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, Putra dan Ulupui (2015) bahwa DAK berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, dan penelitian yang dilakukan oleh Harap (2017) bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Upah Minimum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dalam hipotesis sebelumnya upah minimum berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Upah minimum merupakan upah yang ditetapkan oleh gubernur/bupati yang berlaku di kabupaten/kota dan upah minimum merupakan salah satu komponen yang dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat dari satu kabupaten atau provinsi.

Berdasarkan Hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan, variabel indeks pembangunan manusia dengan nilai signifikan $0,008 < 0,05$ maka hipotesis 5 (H_4) diterima, dengan artinya semakin tinggi upah minimum yang ada di setiap kabupaten/kota di NTT akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia yang semakin tinggi di NTT. Upah minimum merupakan salah satu faktor dimana suatu indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di provinsi NTT tinggi atau rendah maka dengan meningkatkan upah minimum akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Afif & Yulianti, 2019; Lugastoro, 2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi upah minimum maka semakin tinggi indeks pembangunan manusia.

Upah Minimum Memediasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dalam hipotesis sebelumnya upah minimum memediasi pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia. Upah minimum memiliki hubungan dengan pendapatan asli daerah yang dimana upah minimum memediasi pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil uji SPSS pada Tabel 11 dan 12 pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikan sebesar 0,006 kearah yang negatif terhadap upah minimum sedangkan nilai signifikan upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 0,018 yang dimana pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap upah minimum kearah negatif dan upah minimum berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.. Dapat disimpulkan upah minimum tidak dapat menjadi variabel mediasi pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia maka hipotesis enam (H_6) ditolak. PAD yang memiliki nilai signifikan negatif terhadap Upah minimum yang menjadikan upah minimum di kabupaten/kota di provinsi NTT tidak ditentukan berdasarkan PAD sedangkan upah minimum memiliki nilai signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia yang dimana upah minimum semakin tinggi akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di provinsi NTT hal ini tidak sejalan dengan teori Solimum, 2011 tentang variabel mediasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian azhari *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa upah minimum memediasi pendapat asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum tidak dapat memediasi pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia karena pendapatan asli daerah tidak signifikan positif terhadap upah minimum dan indeks pembangunan manusia.

Upah Minimum Memediasi Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dalam Hipotesis sebelumnya upah minimum memedia dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia. Pengaruh langsung dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang lebih kecil ketimbang pengaruh tidak

langsung yang dimana upah minimum menjadi mediasi antara dana perimbangan dengan indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan hasil uji SPSS Tabel 11 dan 12 dana perimbangan memiliki nilai signifikan sebesar 0,004 terhadap upah minimum sedangkan nilai signifikan upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 0,018 yang dimana pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap upah minimum dan upah minimum berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sehingga upah minimum dapat menjadi variabel pemediasi dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia maka hipotesis tujuh (H_7) diterima. Hal ini sejalan dengan teori Solimun, 2011 tentang variabel mediasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (azhari, et.al., 2021) yang menyatakan bahwa upah minimum memediasi dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia memiliki hubungan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia melalui upah minimum di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah: Pertama Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Upah Minimum di Kabupaten/Kota seluruh provinsi NTT, Kedua Dana Perimbangan memiliki berpengaruh positif terhadap upah minimum di Kabupaten/Kota seluruh Provinsi NTT, ketiga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota seluruh Provinsi NTT, keempat Dana Perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota seluruh Provinsi NTT, kelima Upah Minimum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota seluruh Provinsi NTT, keenam Upah Minimum tidak dapat Memediasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota seluruh Provinsi NTT, Ketujuh Upah Minimum Memediasi Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota seluruh Provinsi NTT.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang mempengaruhi penelitian ini adalah waktu atau koefisien penelitian baik dari web tempat penelitian yang cukup lama pengambilan data, dimana data yang dibutuhkan ada yang belum disimpan di web sehingga membutuhkan waktu yang begitu lama untuk mengumpulkan dan mendapatkan data-data tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah ditetapkan di atas, maka saran-saran yang diberikan penulis guna mempermudah penelitian selanjutnya yaitu: Pertama Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di NTT a. Pemerintah Kabupaten/Kota di NTT diharapkan dapat menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dimana yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia bisa ditentukan salah satu faktornya dari pendapatan asli daerah. b. Pemerintah Kabupaten/Kota di NTT harus mampu membuat kebijakan dan strategi yang tepat sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing agar bisa mengoptimalkan instrumen IPM. Yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Kedua Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode tahun lebih yang terdaftar di BPS agar hasil dari penelitian yang dilakukan dapat lebih representatif, dan ketiga Bagi Masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, Instansi-instansi maupun wajib pajak agar mempunyai kesadaran dalam membayar pajak tepat waktu guna

meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, Dwiyantari dan Darmada. 2017. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLpA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali periode 2008-2013. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara, Medan 16-19 September 2015*.
- Afif, AN, dan Yulianti, Y. 2019. Determinasi Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia (Studi kasus Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2013-2016). *Solusi*, 16(2): 154-175.
- Ardiansyah, V.A. dan Widiyaningsih. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. 2021. <https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html>.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Timur. 2021. <https://ntt.bps.go.id/publication/2021/02/26/28a3d01a29a82489c3f95190/provinsi-nusa-tenggara-timur-dalam-angka-2021.html>.
- Bappenas. 2003. *Perencanaan Pembangunan Nasional*, Bappenas TA-SRPP, Jakarta.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gunanto. R. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KKP Pratama Bengkulu. *Skripsi*. Universitas Bengkulu.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indriantoro dan Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE. Yogyakarta.
- Irwanti, Eva. 2014. Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi di Papua Barat Periode 2008-2012. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Keputusan Gubernur Nusan Tenggara Timur Nomor: 305 /KEP/ HK/ 2020*
- Ladjin, N. 2018. Analisis Kemandirian Fiskal Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tengah). Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Lugastoro. 2013. Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmia Mahasiswa*, 1(2): 1-9.
- Mahihody. 2018. Pengaruh Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pembangunan di Kota Manado. *Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomu dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia*.
- Mirsan, MA, Hamzah, N., dan Sjufri, m. 2019. Pengaruh Investasi, PDB per Kapital dan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Derajat Kemandirian fiskal. *Paradoks-Jurnal Ekonomi*.
- Panjawa, J., dan Soebagiyo, D. 2014. Pengaruh Kenaikan Upah Minimum terhadap tingkat pengangguran. *Jurnal Statistik Ekonomi & Pembangunan*, 15(1): 48-54.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Pradnyantari dan Dwirandra. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada IPM dengan Variabel Pemoderasi Dana Alokasi Umum di Provinsi Bali tahun 2010-2015 *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 19(1): 536-564,ISSN: 2302-855.
- Puspita, S.2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Predikasil Belanja Daerah (Studi Empiris di Wilaya Provinsis Jawa Tengah dan DIY). *JAAI* 8(2).
- Putra dan Ulupui. 2015. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11.3: 863-877, ISSN:2302 – 8556.
- Scott, W. R. 2015. 2015. *Financial Accounting Theory*. 7th Edition. Printice Hall. United Statesof America.
- Simanjuntak. 1998. *Pengantar Ekomomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta:FEUI. Solimun. 2011. Analisis Variabel Moderasi dan Medisdi. Program Studi Statistika FMIPA Univesitas Brawijaya. Malang.
- Solimum.2011.Analisis *Variabel Moderasi dan Mediasi*. Program Studi Statistik FMIPA Unversitas Brawijaya.Malang.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuntitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Tahar,A., dan Hakim,A.2013. Indes Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. 9(1): 18-26.
- Undang-Undang Repoblik Indonesie Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah.
- Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 TentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- Udang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan.
- UNDP. 1995. *Human Development Report” United Nations DevelopmentProgramme*. New York.
- Wasilaputri, FR. 2016. Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDB dan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 5(3): 243-250.
- Wiliantara dan Budiasih. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alikasi Khusus, dan Dana Bagi Hasi Pada Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009- 2013. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16(3): 2044-2070,ISSN: 2302-8556.